



Bandung, 2 Maret 2021

Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Disampaikan Oleh:

IENDRA SOFYAN

Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Barat

Pada Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022





1

Kondisi Ekonomi
Jawa Barat dan
Kota Cimahi

3

Tema dan Prioritas
Pembangunan &
Tahun 2022

5

Kebijakan Umum
Penyusunan RKPD
2022

2

Tantangan dan
Peluang

4

Inovasi Daerah

6

Arahan
Penyempurnaan
RKPD

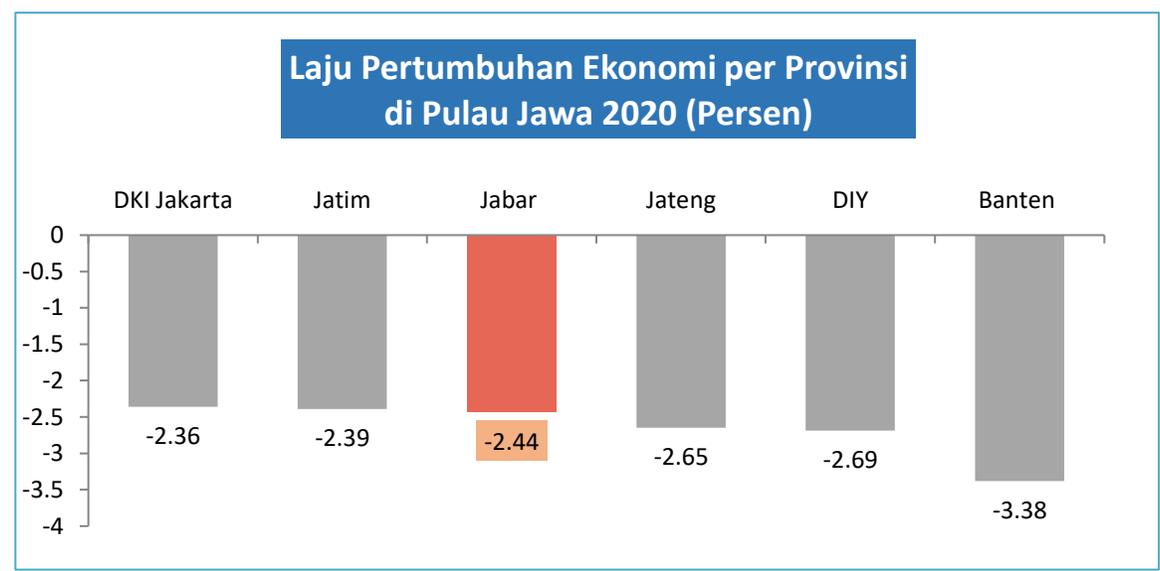


Kondisi Ekonomi Jawa Barat & Kota Cimahi



KONDISI EKONOMI JAWA BARAT

- Pada 2020, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat **TERKONTRAKSI** sebesar **2,44% (yoy)** sebagai dampak **pandemi COVID-19** yang menurunkan **daya beli masyarakat** dan **produktivitas lapangan usaha utama** di Jawa Barat. Meskipun terkontraksi, LPE Jawa Barat tahun 2020 masih **lebih tinggi** dari capaian Jawa Tengah, DIY dan Banten serta **menopang perekonomian nasional** dengan *share* mencapai **14,57%**.

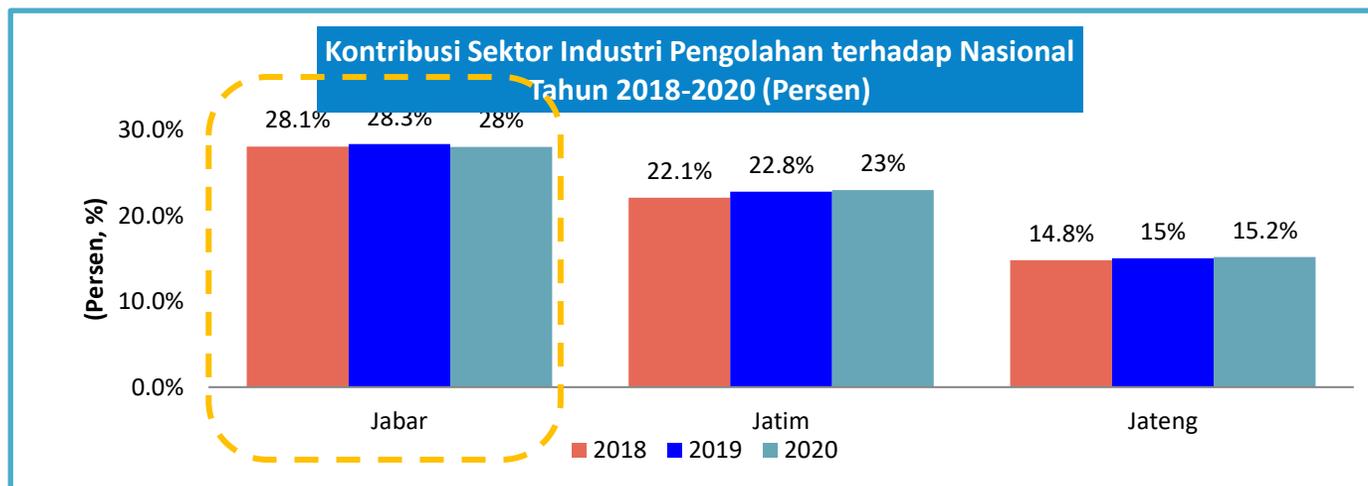
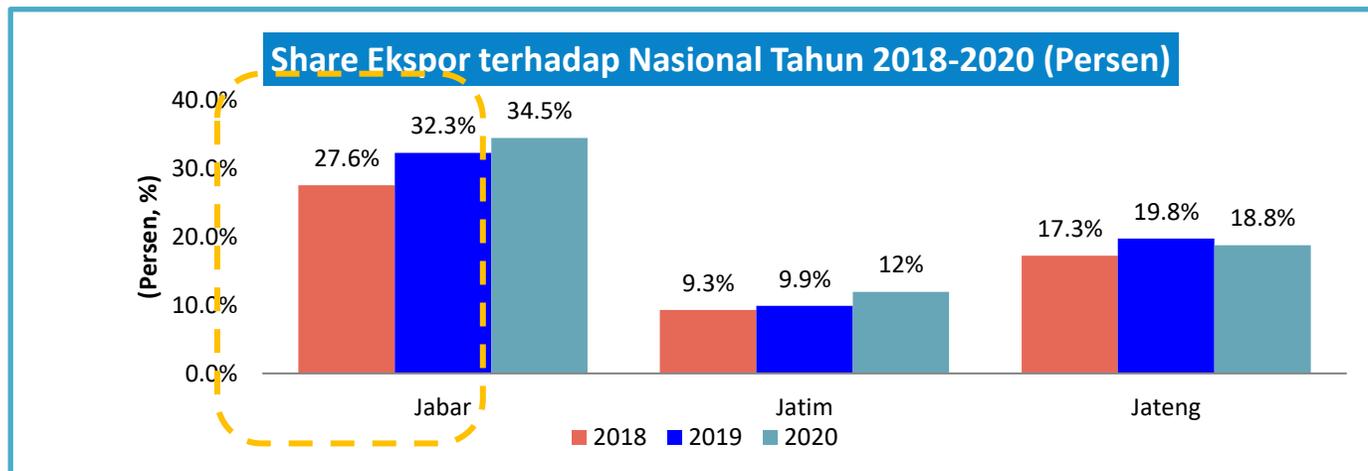
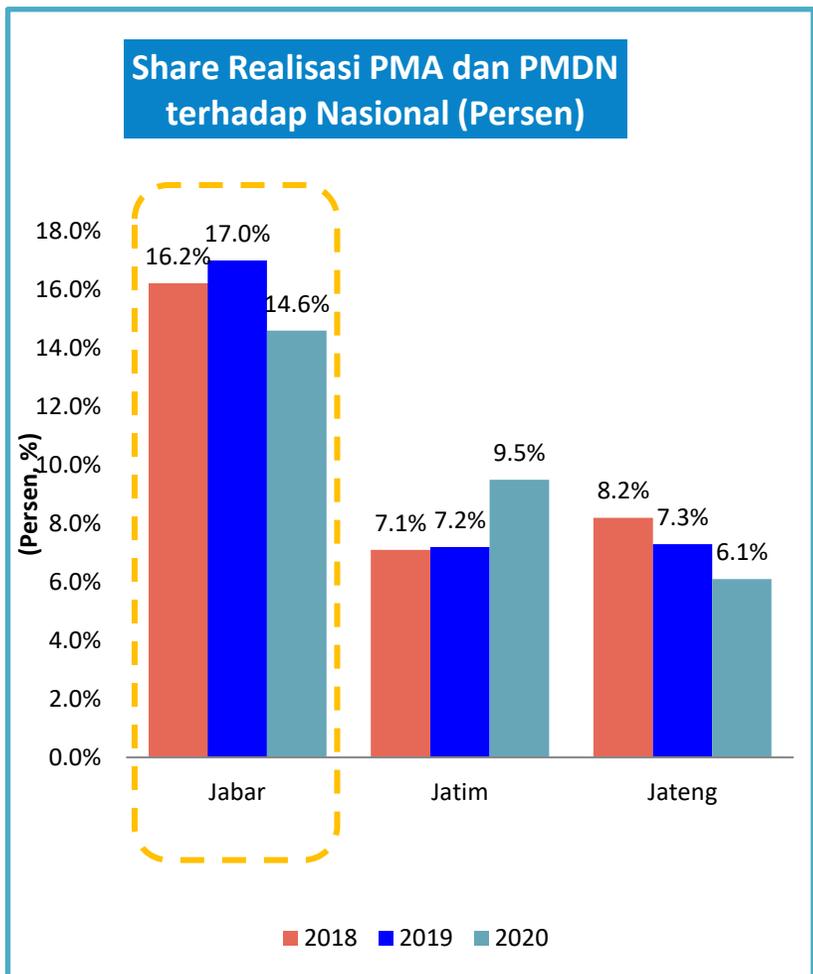




JABAR DALAM KONSTELASI NASIONAL



Peran Jawa Barat dalam konstelasi perekonomian Nasional sangat **strategis**, dibuktikan dengan **share** realisasi investasi yang mencapai 14,6%, ekspor sebesar 34,5% dan sektor industri pengolahan sebesar 28% terhadap nasional.

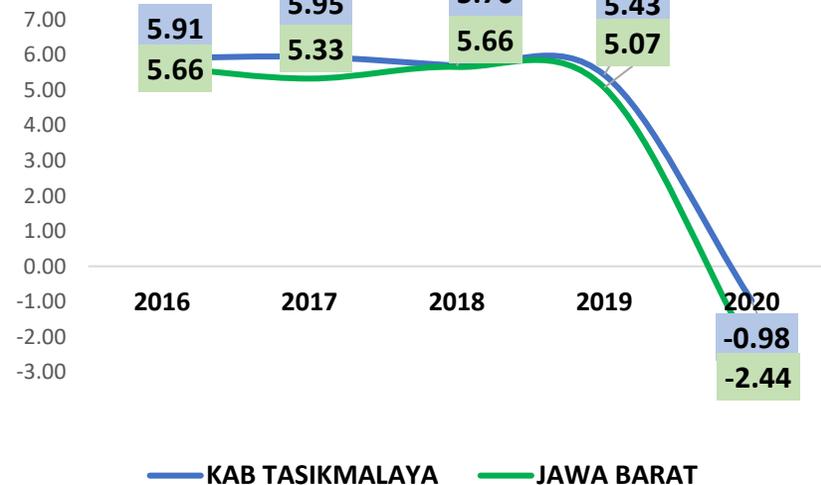


KONDISI EKONOMI KABUPATEN TASIKMALAYA

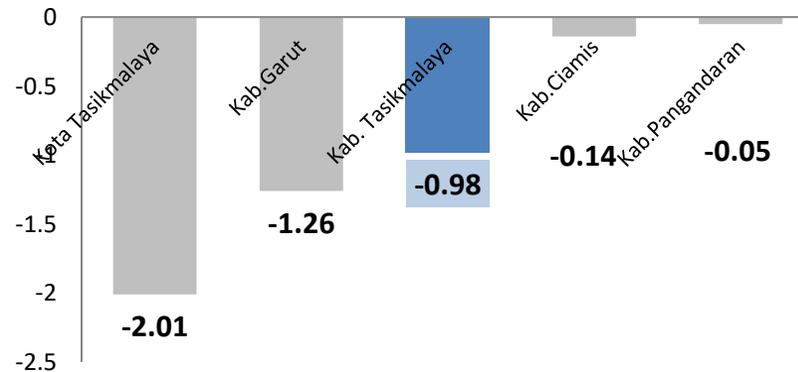


- Pada 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kab.Tasikmalaya sebesar **-0,98% (yoy)**, meskipun terkontraksi namun capaian LPE Kab.Tasikmalaya masih **lebih tinggi** dari LPE wilayah di sekitarnya (Kota Tasikmalaya dan Kab.Garut) bahkan Jawa Barat.
- Kab.Tasikmalaya berkontribusi terhadap PDRB Jawa Barat sebesar **1,76%** atau berada di **peringkat ke-17** dari 27 Kab/Kota di Jawa Barat.
- Struktur ekonomi Kab.Tasikmalaya pada tahun 2019 masih didominasi sektor **Pertanian, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Konstruksi.**

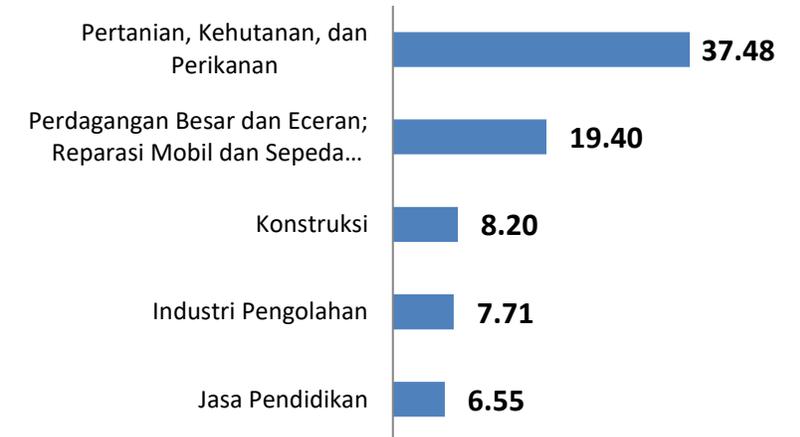
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (2016-2020)



Laju PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)



Distribusi PDRB ADHB Kab. Tasikmalaya Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 (Persen)





Tantangan dan Peluang

2022
JAWA BARAT



ISU STRATEGIS

(PROVINSI JAWA BARAT)



Kualitas Nilai Kehidupan dan daya saing sumber daya manusia



Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial



Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan



Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan



Reformasi Birokrasi

TANTANGAN PEMULIHAN EKONOMI JAWA BARAT

2022
JAWA BARAT



Bertambahnya **Masyarakat Terkonfirmasi Covid 19** (terkonfirmasi 86.250 org);



Meningkatnya kebutuhan **Alat Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan** (termasuk Masker dll) serta tempat pengolahan limbah medis;



Bertambahnya **Penduduk Miskin** (meningkat menjadi 7,88% maret 2020, akan meningkat menjadi 7,99% sd 8,02% tahun 2021);



Bertambahnya **Pengangguran Terbuka** (Februari ke Agustus 2020, bertambah 780 ribu orang 10,46%, akan meningkat menjadi 10,81% sd 11.55% tahun 2021);



Meningkatkan **Ketahanan dan Kemandirian Pangan** (defisit gula pasir, minyak goreng, bawang putih, kedelai, daging sapi, telur ayam, gangguan akibat iklim);



Tertekannya **Indeks Pembangunan Manusia** terutama pengeluaran/daya beli masyarakat;



Meningkatnya kebutuhan **Digitalisasi Ekonomi** terutama UMKM/IKM dan Layanan Internet (masih ada 326 Desa *Blank Spot*);



Meningkatnya kebutuhan Peningkatan Kualitas **Pariwisata** sesuai AKB;



Meningkatnya kebutuhan **Relaksasi dan Restrukturisasi Kredit** serta menurunkan **Suku Bunga** Pinjaman Perbankan.

PELUANG PEMULIHAN EKONOMI JAWA BARAT

2022
JAWA BARAT



Pelaksanaan **Vaksinasi Covid 19** secara menyeluruh (40 juta Masyarakat Jabar) sampai dengan akhir tahun; Masyarakat terkonfirmasi Covid 19 akan terkendali;



Pertumbuhan **Ekonomi diprediksi positif** 3,33% s/d 4,49% dengan inflasi yang terkendali;



Kegiatan **Pariwisata** akan berlanjut dengan beradaptasi dengan protokol kesehatan;



Kegiatan **Investasi** akan meningkat terutama pada Kawasan Metropolitan Rebana;



Kegiatan **Perdagangan** akan meningkatkan terutama ekspor sejalan dengan pulihnya ekonomi global;



Kegiatan **Pembangunan Infrastruktur** akan terus berlanjut, baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi (*multi years* dan pinjaman PEN Daerah) dan Kabupaten/Kota;



Program Pemerintah Pusat untuk **PEN** tetap berlanjut;



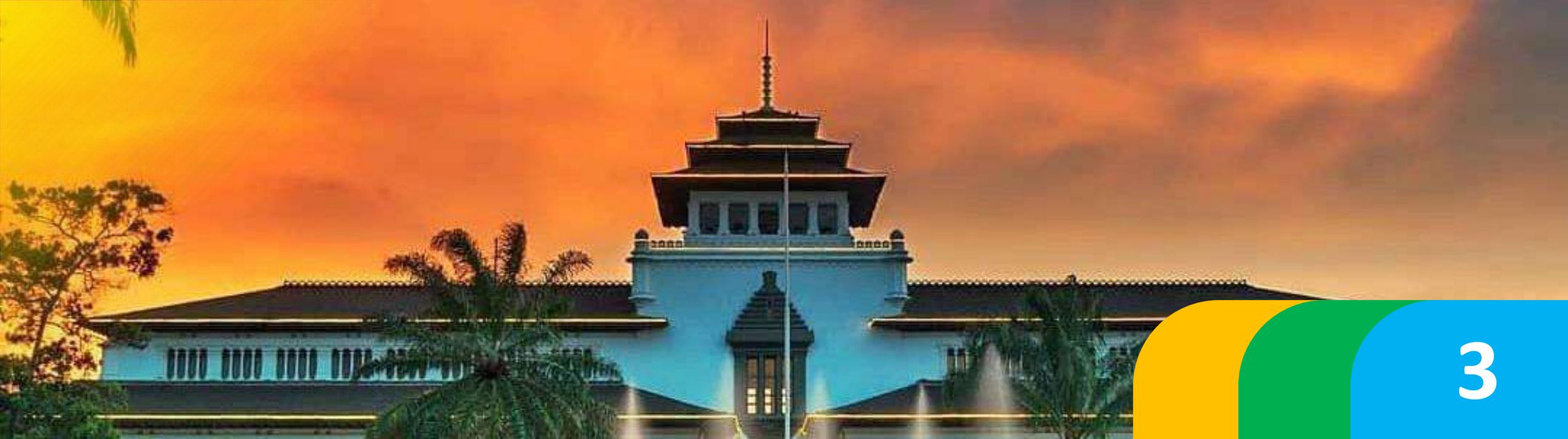
Program **Bantuan Sosial (JPS)** oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi tetap berlanjut;



Kegiatan **Kerjasama antar daerah** dan pentahelix akan menjadi penguat pertumbuhan;

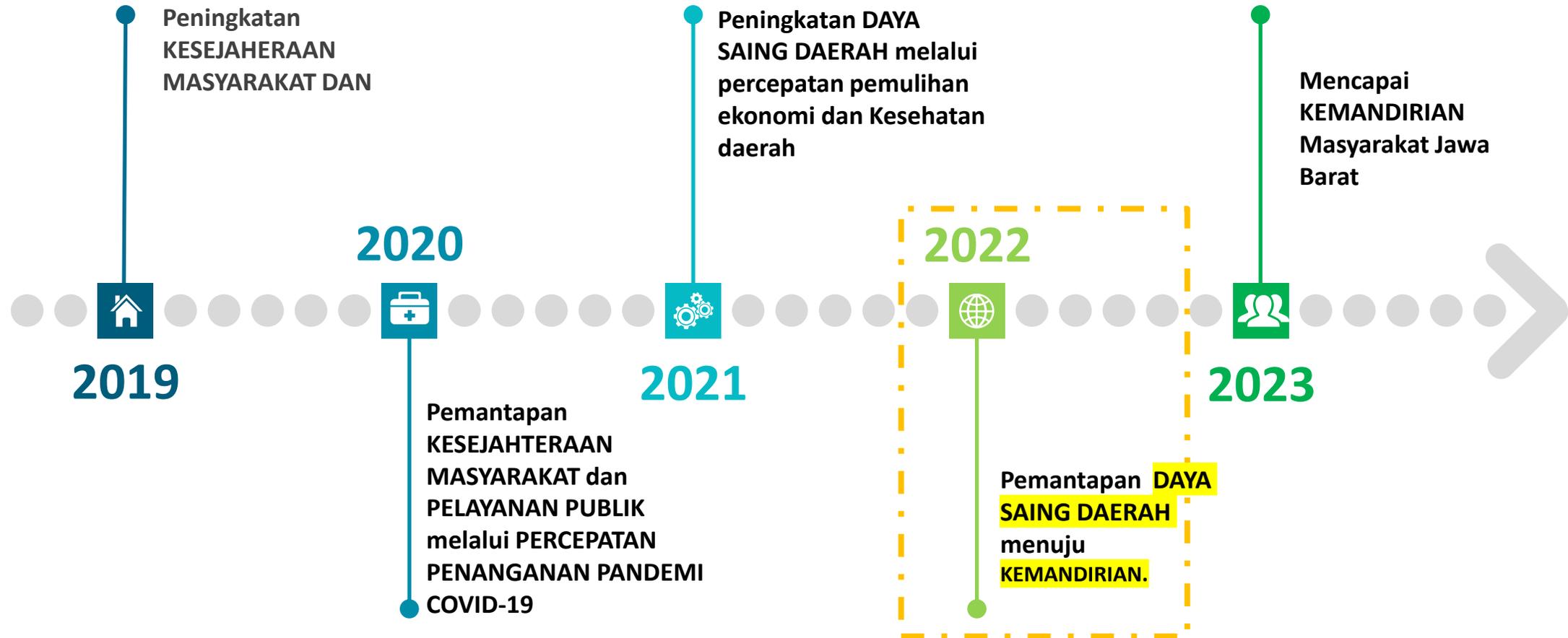


Kegiatan **Vokasi** akan tumbuh dan bertransformasi ke *link and match* dengan dunia usaha;



Tema Pembangunan & Prioritas Pembangunan Tahun 2022

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT



PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022-2023

2022
JAWA BARAT

1 Reformasi sistem kesehatan daerah;

2 Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;

3 Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;

4 Reformasi sistem perlindungan sosial;

5 Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;

6 Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana;

7 Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;

11

Prioritas Pembangunan Daerah

8 Gerakan membangun desa;

9 Pendidikan agama dan tempat ibadah juara

10 Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

11 Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.



Inovasi Daerah

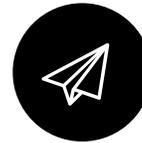
2022
JAWA BARAT

DEFENISI

INOVASI DAERAH ADALAH SEGALA BENTUK PEMBAHARUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERTUJUAN MENINGKATKAN KINERJA PEMDA



INOVASI DAERAH



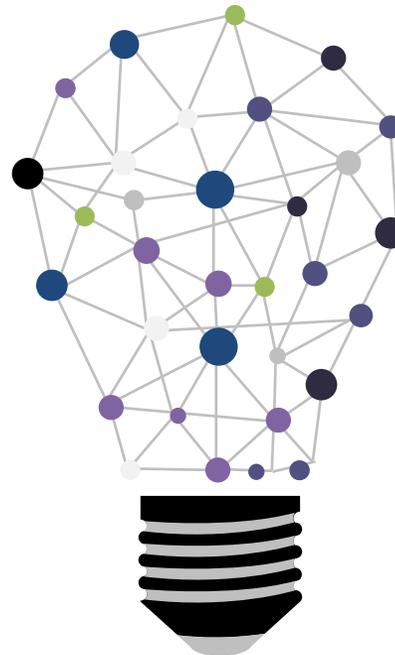
PRINSIP-PRINSIP

EFISIENSI | EFEKTIVITAS | PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN | TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN | PUBLIC ORIENTED | TERBUKA | MEMENUHI NILAI KEPATUTAN | DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN TIDAK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI



PERLINDUNGAN HUKUM

ASN TIDAK BISA DIPIDANA JIKA UJI COBA INOVASI DAERAH TIDAK MENCAPI SASARAN SEPERTI YANG DITETAPKAN *SKB



BENTUK INOVASI

- INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH;
- INOVASI PELAYANAN PUBLIK; DAN/ATAU
- INOVASI DAERAH LAINNYA SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.

KRITERIA

- MENGANDUNG PEMBAHARUAN SELURUH ATAU SEBAGIAN UNSUR DARI INOVASI;
- MEMBERI MANFAAT BAGI DAERAH DAN/ATAU MASYARAKAT;
- TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN DAN/ATAU PEMBatasan PADA MASYARAKAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH; DAPAT DIREPLIKASI.

INISIATOR

INISIASI INOVASI DAERAH → IDE KREATIF YANG DAPAT BERASAL → KDH, ANGGOTA DPRD, OPD, ASN DAN MASYARAKAT



POTENSI EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA BARAT



2022
JAWA BARAT

**JUMLAH
USAHA EKRAF
1.504.103**

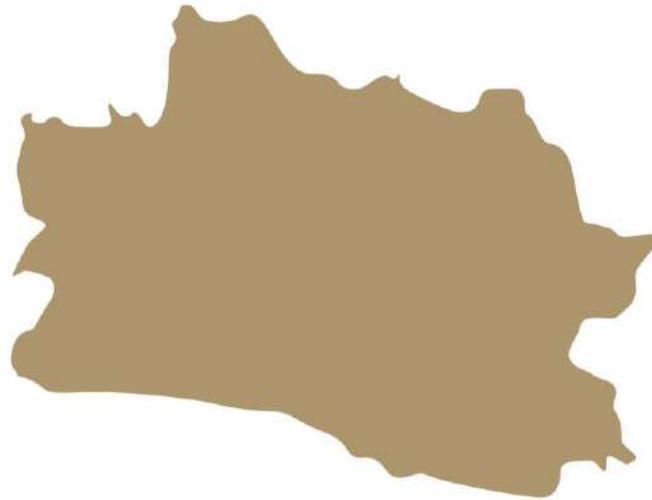
PT/PERSERO
8.641

CV
6.017

IZIN KHUSUS
19.535

BADAN USAHA LAIN
1.372

TIDAK BERBADAN USAHA
1.468.538



TOTAL BERDASARKAN SUBSEKTOR EKRAF



ROAD MAP

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KREATIF JAWA BARAT 2020-2025



2022
JAWA BARAT

01 SDM

Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Kreatif Jawa Barat

02 EKOSISTEM

Membangun ekosistem Ekraf Jabar yang berdaya saing melalui pemanfaatan Teknologi

03 KELEMBAGAAN

Membentuk kelembagaan Ekraf Jabar yang sinergis dan Kolaboratif

04 EKRAF JUARA

EKRAF JUARA

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif sekaligus menangani masalah pengangguran.

05 PARIWISATA JUARA

PARIWISATA JUARA

Mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional melalui pemberian nilai tambah dari sektor pariwisata

Sumber: Disparbud Prov. Jabar, 2019





Kebijakan Umum Penyusunan RKPD 2022

KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2022

2022
JAWA BARAT

1 KAIDAH

Tata cara penyusunan tetap menggunakan kaidah-kaidah dalam **Permendagri No 86 Tahun 2017**, termasuk patokan waktu penyusunan

2 PERMENDAGRI 90/2019 DAN PEMUTAKHIRANNYA

Untuk nomenklatur dan sistem kodifikasi program/kegiatan/subkegiatan, mengacu pada **Permendagri 90 Tahun 2019** dan pemutakhirannya pada **Kepmendagri No. 050-3708**

3 TERINTEGRASI

Terintegrasi antara **sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporan**

4 HASIL EVALUASI KINERJA

Mempertimbangkan hasil **evaluasi kinerja RPJMD** periode sebelumnya, **kinerja Renstra PD**, hasil **evaluasi kinerja RKPD & Renja** serta tahun berjalan (2019 dan 2020) **LKPI**

5 KONSISTENSI/ KESELARASAN

Memperhatikan **konsistensi kinerja perencanaan sampai dengan kinerja penganggaran**, serta adanya keselarasan antara dokumen perencanaan.

6 SIPD

Mengutamakan **penggunaan aplikasi SIPD** dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan daerah.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

UMUM

1. Masyarakat sudah hidup berdampingan dengan COVID-19 seiring dengan **adanya Vaksin**;
2. **Transaksi digital** menjadi **preferensi masyarakat** dalam bertransaksi jual beli dsb;
3. Pemanfaatan **program relaksasi** kredit berjalan **optimal** tetapi memerlukan **dukungan stimulus modal**;
4. Aktifitas **Industri Manufaktur, Investasi dan Pariwisata mulai bergerak** (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan **protokol kesehatan** pada lini produksi

KHUSUS

1. Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pertumbuhan mobilitas penduduk, sehingga dalam melakukan prediksi pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan data *google mobility*. Selain itu, kondisi inflasi yang mencerminkan daya beli masyarakat sejalan dengan rendahnya konsumsi rumah tangga;
2. Asumsi Ekonomi Makro ditentukan oleh asumsi makro Indonesia dan makro dunia;
3. Proyeksi PDRB Lapangan Usaha Sektor Industri mempertimbangkan Manufactures Unit Value (MUV) Index;
4. Proyeksi PDRB Lapangan Usaha Sektor pertanian, secara historis pada Q4 mengalami kontraksi secara qtoq artinya ada pengaruh musiman pada Q4 dimana Jawa Barat masih berada pada fase tanam, di sisi lain prediksi BMKG terkait adanya La Nina pada akhir 2020 s.d. awal 2021 juga diperkirakan memengaruhi produksi hasil pertanian;
5. Asumsi proyeksi lainnya menggunakan kecenderungan data triwulanan/menggunakan aritmatika, atau metode *Cobb-douglass*, kemudian disesuaikan dengan data realisasi terkini.

PROYEKSI

NO	INDIKATOR	PROYEKSI TAHUN 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (POIN)	71,88 - 73,11
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (PERSEN)	1,07
3.	Persentase Penduduk Miskin (PERSEN)	7,91 – 7,88
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (PERSEN)	11,76 - 10,85
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PERSEN)	4,62 - 5,20
6.	Indeks Gini (POIN)	0,401 – 0,394
7.	Pendapatan Per Kapita (JUTA RUPIAH)	46,89 - 48,22



6

Arahan Penyempurnaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

REVIEW HASIL EVALUASI RKPD 2021 (PPD)



- **PENCAPAIAN**, Sebagian besar nilai **pencapaian** pembangunan **2019** menunjukkan **angka yang cukup baik**;
- **KONSISTENSI**, Sebagian besar dokumen sudah memperlihatkan **konsistensi antara RKPD dengan RPJMDnya**;
- **HASIL EVALUASI**, **Belum semua** dokumen memperlihatkan **pemanfaatan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD** tahun sebelumnya untuk perumusan permasalahan dan isu strategis
- **PRIORITAS PEMBANGUNAN**, **Belum semua** dokumen memperlihatkan **konsistensi yang kuat antara prioritas pembangunan dengan program prioritas**
- **DUKUNGAN ANGGARAN**, Masih **banyak dokumen RKPD** yang belum menunjukkan **dukungan anggaran terhadap prioritas pembangunan** dan atau **program prioritas** yang sudah ditetapkan
- **INDIKATOR KINERJA**, Beberapa dokumen RKPD **belum mencantumkan indikator kinerja sasaran** pembangunan daerah dan program prioritas
- **PRIORITAS NASIONAL**, Beberapa kabupaten/kota **belum memperlihatkan secara jelas** di dalam dokumen, **dukungan program prioritas daerah terhadap kegiatan prioritas nasional RKP**.
- **INOVASI**,
 - **Inovasi** yang diusulkan **sebagian besar tidak tercantum di dalam dokumen RKPD** sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.
 - **Sebagian besar** usulan inovasi **belum secara khusus dikaitkan dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi sosial** akibat dampak pandemi Covid-19
 - **Belum semua kabupaten/kota** melakukan **pengukuran IKM** terhadap kinerja perangkat daerah



MUATAN RKPD

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

MATERI DAN INDIKATOR

PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017		MATERI DAN INDIKATOR
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	
1.3	Hubungan Antar Dokumen	
1.4	Maksud dan Tujuan	
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	1. Tersedianya data Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan PDRB per Kapita
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	2. Tersedianya data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Penganggur
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	3. Tersedianya data Kemiskinan
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	4. Tersedianya data Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	5. Tersedianya data Ketimpangan
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.	6. Tersedianya data Pelayanan Publik dan Pengelolaan Keuangan
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	7. Tersedianya data Transparansi dan Akuntabilitas
2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	
2.3.2	Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1. Tersedianya kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang dilengkapi dengan proyeksi dan arah kebijakan
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	

KETERKAIATAN RKPD DENGAN PPD



PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2022		MATERI DAN INDIKATOR
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya penjelasan keterkaitan antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2022 2. Terwujudnya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2020 dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2022 3. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2022 4. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2022 dengan program prioritas daerah 5. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas RKP 2022 6. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP 2022 7. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan prioritas pada PN Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2022 8. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2022 9. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP 2022 10. Tersedianya dukungan program prioritas daerah RKPD 2022 terhadap kegiatan Prioritas pada PN Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2022 11. Tersedianya indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dan program prioritas 12. Tersedianya Sub Aspek Inovasi
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	

KETERKAIATAN RKPD DENGAN PPD



PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD 2022		MATERI DAN INDIKATOR
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
		<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya penjelasan strategi dan arah kebijakan RKPD 2022 yang terkait dengan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD2. Tersedianya kebijakan pembangunan daerah RKPD 2022 yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
		<ol style="list-style-type: none">1. Terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan dalam RKPD 2022 dengan pagu anggaran
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
BAB VIII	PENUTUP	



○ ○ ○

TERIMA KASIH

"Sukses Perencanaan Sukses Implementasi"

Jalan Ir. H. Juanda No.287, Dago, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat | 40135

Telp : (022) 25 16065 | Fax (022) 2510731
Email : public@bappeda.jabarprov.go.id



Bappeda Jabar



bappedajabar



bappedajabar



Bappeda Provinsi Jawa Barat



bappeda.jabarprov.go.id